



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT EDARAN

NOMOR SE- 47 /PB/2018

TENTANG
LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN AREA RAWAN
YANG BERPOTENSI KORUPSI/SUAP/GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

A. Umum

Dalam rangka meningkatkan *good governance*, kualitas kinerja, layanan dan kepercayaan publik yang lebih baik, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen untuk terus menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan negara. Namun demikian, masih terdapat area rawan yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi dan gratifikasi dalam tata kelola yang dapat merusak integritas pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Oleh karena itu, dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan langkah-langkah penanganan terhadap area rawan yang berpotensi korupsi/suap/gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka penanganan area rawan yang berpotensi korupsi/suap/gratifikasi.

2. Meningkatkan kualitas tata kelola dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

C. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran ini mengidentifikasi area rawan yang berpotensi korupsi/suap/gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan langkah-langkah pencegahan serta pengendaliannya.
2. Surat Edaran ini ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, serta para Kepala Kanwil dan para Kepala KPPN.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
5. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 247/PB/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
6. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-338/PB/2018 tentang Tim Penyusun Langkah-Langkah Penanganan Area Rawan Korupsi/Suap/Gratifikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

E. Langkah-langkah penanganan

1. Memetakan area rawan yang berpotensi korupsi/suap/gratifikasi serta langkah-langkah penanganannya di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran surat edaran ini.
2. Setiap unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian terhadap area rawan yang berpotensi korupsi/suap/gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara bersungguh-sungguh dan berkesinambungan dengan berpedoman pada surat edaran ini.
3. Setiap unit kerja dapat melakukan pemetaan area rawan yang berpotensi korupsi/suap/gratifikasi serta langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang belum tercantum dalam lampiran surat edaran ini.

4. Terkait proses pengadaan barang dan jasa, setiap unit kerja agar:
 - a. melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh penyedia barang dan jasa secara transparan serta akuntabel dengan mengedepankan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien.
 - b. menegaskan komitmen Integritas dan Anti Korupsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan antara lain melalui pembuatan pakta integritas dan internalisasi anti korupsi/suap/gratifikasi dengan penyedia barang dan jasa.
 - c. melakukan evaluasi secara periodik terhadap penyedia barang dan jasa yang bekerja sama dengan unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan.
 - d. Mengoptimalkan sarana informasi untuk menyampaikan kembali komitmen Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bebas dari korupsi, suap, dan gratifikasi kepada masyarakat.
5. Setiap pegawai agar melaksanakan mekanisme pelaporan gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di unit kerja masing-masing dan terhadap gratifikasi terkait kedinasan berupa honorarium dan/atau pembiayaan perjalanan dinas yang diterima dari pihak lain agar dilaporkan kepada atasan langsung.
6. Unit Kepatuhan Internal agar melakukan pengujian kepatuhan terhadap area rawan yang berpotensi korupsi/suap/gratifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

F. Penutup

Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, para Direktur, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, serta para Kepala Kanwil dan para Kepala KPPN diminta untuk melaksanakan Surat Edaran ini, dan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL,



LAMPIRAN
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR SE- 47 /PB/2018 TENTANG LANGKAH-LANGKAH
 PENANGANAN AREA RAWAN KORUPSI/SUAP/GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

**PEMETAAN DAN PENANGANAN AREA RAWAN KORUPSI/SUAP/GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

A. KEGIATAN PENGELOLAAN ANGGARAN DAN BARANG MILIK NEGARA

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemanfaatan BMN untuk ATM dan Kantin Kantor	Uang sewa/uang jasa kebersihan tidak disetorkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Pengawasan oleh Kuasa Pengguna Barang/Kepala Bagian Umum/Kepala Subbagian Umum • Pembinaan dan supervisi KPPN oleh Kanwil • Internalisasi/GKM SOP dan Peraturan (PMK nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN) • Pengujian Kepatuhan oleh UKI • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi Arahan Kuasa Pengguna Barang/Kepala Bagian Umum/Kepala Subbagian Umum • Laporan hasil pembinaan dan supervisi KPPN oleh Kanwil • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP dan Pertauran (PMK Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN) • Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan oleh UKI • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Sekretariat/ Kanwil/ KPPN
2.	Pemanfaatan gedung kantor <i>idle</i>	Pemungutan uang sewa untuk pemanfaatan gedung kantor yang <i>idle</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas Pengelola Gedung untuk mess/ penginapan • Pengawasan oleh Kuasa Pengguna Barang/Kepala Bagian Umum/Kepala Subbagian Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi Arahan Kuasa Pengguna Barang/Kepala Bagian Umum/Kepala Subbagian Umum 	Sekretariat/ Kanwil/ KPPN

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan supervisi KPPN oleh Kanwil • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP (PMK nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN) • Melaksanakan ketentuan dan prosedur PMK nomor 57/PMK.06/2016 • Pengujian Kepatuhan oleh UKI • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pembinaan dan supervisi KPPN oleh Kanwil • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP dan peraturan (PMK nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN) • Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan oleh UKI • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	
3.	<p>Pengadaan barang/jasa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penawaran produk (barang/jasa/ perhotelan) dari pihak ketiga yang datang langsung - pelaksanaan kegiatan paket meeting di hotel - Mark-Up Pengadaan - Pembuatan Kuitansi Kosong yang sudah ditandatangani Vendor dan stempel vendor sudah disiapkan - Pengadaan tanpa melalui prosedur (belanja langsung, kontrak palsu dibuat kemudian) - Kegiatan atau pengadaan fiktif - Pemotongan honor 	<ul style="list-style-type: none"> • Uang • Parcel/c Cinder mata • Voucher/diskon menginap • Refund 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas Panitia/Pejabat Pengadaan/PPK dengan Pihak Ketiga • Pengawasan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bagian Umum/ Kepala Subbagian Umum/ Atasan langsung • Pengawasan oleh Pejabat/ Pengelola Keuangan (PPK/ PPSPM/Bendahara Pengeluaran) • Pembinaan dan supervisi KPPN oleh Kanwil • Internalisasi/GKM Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Penyusunan SOP penerimaan rekanan/pihak ketiga • Melaksanakan prosedur penelitian/ verifikasi LPJ TKPKN secara prudent dengan konfirmasi setoran pajak ke KPPN • Pengujian Kepatuhan oleh UKI • Pemantauan pengendalian internal proses pengadaan barang/jasa oleh 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi Arahan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bagian Umum/ Kepala Subbagian Umum / Atasan langsung • Notulensi rapat evaluasi pelaksanaan anggaran bulanan/triwulan • Checklist Pengadaan barang/ jasa • Laporan hasil pembinaan dan supervisi KPPN oleh Kanwil • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • SOP penerimaan rekanan/pihak ketiga • LPJ TKPKN terverifikasi dan hasil konfirmasi setoran pajak • Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan oleh UKI • Laporan hasil pemantauan pengendalian internal proses 	Sekretariat/ Direktorat/ Kanwil/ KPPN

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>satpam, supir dan pramubakti (double kontrak)</p> <p>- Pajak-pajak (PPh Pasal 21, 22, 23 dan PPN) tidak disetor</p>		<p>UKI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<p>pengadaaan barang/jasa oleh UKI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	
4.	Perjalanan dinas fiktif & lembur tidak produktif	Uang	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Pengawasan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bagian Umum/Kepala Subbagian Umum • Pengawasan oleh atasan langsung dalam pelaksanaan lembur • Internalisasi/GKM KMK Nomor 113 tahun 2012 dan peraturan lembur PMK No 85/PMK.05/2017 • Pengujian Kepatuhan oleh UKI • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi Arahan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bagian Umum/Kepala Subbagian Umum • Surat Pernyataan Tanggungjawab Perintah Lembur (SPTPL) • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM KMK Nomor 113 Tahun 2012 dan peraturan lembur PMK No 85/PMK.05/2017 • Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan oleh UKI • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Sekretariat/ Direktorat/ Kanwil/ KPPN

B. KEGIATAN NON PENGELOLAAN ANGGARAN DAN BARANG MILIK NEGARA

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kunjungan dinas ke kantor vertikal	<ul style="list-style-type: none"> • Bingkisan • Cinderata • Pemberian fasilitas hiburan 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pengawasan atasan langsung • Sosialisasi surat Dirjen Perbendaharaan terkait pengendalian gratifikasi • Pemantauan kode etik oleh UKI • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Notulensi Arahan Atasan Langsung • Notulensi sosialisasi surat Dirjen Perbendaharaan terkait pengendalian gratifikasi • Laporan hasil pemantauan kode etik • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan • Laporan gratifikasi 	Sekretariat/Direktorat/Kanwil
2.	Monev ke Satker/Pemda /BLU/BLUD/BUMN/ BUMD/BPJS	<ul style="list-style-type: none"> • Bingkisan • Cinderata • Double pembayaran terkait biaya transportasi akomodasi • Pemberian fasilitas hiburan 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pengawasan atasan langsung dan pengawasan peer. • Pemantauan kode etik oleh UKI • Pakta Integritas Pegawai yang bertugas dan Pejabat satker yang didatangi • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait dengan tata cara monev • Laporan Monev • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG, dan melaporkan Gratifikasi terkait kedinasan berupa honorarium dan atau pembiayaan transportasi/akomodasi kepada atasan langsung • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Notulensi Arahan Atasan Langsung • Laporan hasil pemantauan kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi GKM peraturan dan SOP terkait dengan tata cara monev • Kertas kerja dan Berita Acara monev • Laporan Gratifikasi/Laporan Gratifikasi terkait kedinasan • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Direktorat/Kanwil/KPPN
3	Pembinaan ke Satker / BLU	<ul style="list-style-type: none"> • Bingkisan • Cinderata • Double pembayaran terkait biaya transportasi akomodasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta Integritas Pegawai yang bertugas dan Pejabat satker yang didatangi • Internalisasi/GKM kode etik • Pengawasan atasan langsung dan pengawasan peer 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Pakta Integritas • Laporan kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Notulensi Arahan Atasan Langsung 	Direktorat/Kanwil/KPPN

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> Pemberian fasilitas yang tidak berhubungan dengan kegiatan pembinaan/fasilitas hiburan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan kode etik oleh UKI Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait dengan pembinaan Sosialisasi aplikasi HAI DJPb sebagai wadah konsultasi/ pembinaan ke satker K/L Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG, dan melaporkan Gratifikasi terkait kedinasan berupa honorarium dan atau pembiayaan transportasi/akomodasi kepada atasan langsung Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pemantauan kode etik Notulensi GKM peraturan dan SOP terkait dengan pembinaan Notulensi sosialisasi aplikasi HAI DJPb Laporan Gratifikasi/Laporan Gratifikasi terkait kedinasan Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	
4.	Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis kepada satker/BLU/Pemda	<ul style="list-style-type: none"> Bingkisan C Cinder mata Double pembayaran terkait biaya honorarium/transportasi dan akomodasi Pemberian fasilitas yang tidak berhubungan dengan kegiatan Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis Honorarium melebihi standar biaya 	<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi/GKM kode etik Pakta Integritas Pengawasan pimpinan/atasan langsung Pemantauan kode etik oleh UKI Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait dengan Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG, dan melaporkan Gratifikasi terkait kedinasan berupa honorarium dan atau pembiayaan transportasi/akomodasi kepada atasan langsung . Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik Dokumen Pakta Integritas Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung Laporan hasil pemantauan kode etik Notulensi terkait dengan Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis Laporan Gratifikasi/Laporan Gratifikasi terkait kedinasan Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Direktorat/Kanwil/KPPN
5.	Penerbitan surat dispensasi pembayaran/pencairan dana	Gratifikasi berupa uang/barang	<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi/GKM kode etik Pakta integritas 	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik Dokumen Pakta Integritas 	Dit. PA/Kanwil/KPPN

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait penerbitan surat dispensasi pembayaran/pencairan dana • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM terkait penerbitan surat dispensasi pembayaran/pencairan dana • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	
6.	Penerbitan Ketentuan (SE) Maksimum Pencairan Dana PNBP	Gratifikasi berupa uang/ barang	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta integritas • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait penerbitan SE maksimum pencairan dana PNBP • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait penerbitan SE maksimum pencairan dana PNBP • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Dit. PA
7.	Penempatan BUMPUN	Gratifikasi berupa uang/ barang	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta integritas • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait Penempatan BUMPUN • CCTV • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM peraturan dan SOP terkait Penempatan BUMPUN • Bukti rekaman • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Dit PKN
8.	Penyusunan Peraturan Counterparty Limit	Gratifikasi berupa uang/ barang	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta integritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas 	Dit PKN

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Approval berjenjang sampai dengan Direktur • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait Perhitungan <i>Counterparty Limit</i> • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Bukti approval • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM peraturan dan SOP terkait penyusunan <i>Counterparty Limit</i> • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	
9.	Pemilihan penyimpan reboisasi	bank dana	Gratifikasi berupa uang/ barang	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta integritas • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Pembentukan Tim Penilai Bank • Internalisasi GKM Peraturan/pedoman pemilihan bank penyimpan dana reboisasi • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Surat Keputusan Tim Penilai Bank • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM peraturan/pedoman pemilihan bank penyimpan dana reboisasi • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan
10.	Penunjukan BO I Pusat dan Bank Penyalur Gaji		Gratifikasi berupa uang/ barang	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Approval berjenjang sampai dengan Direktur • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP Penunjukkan BO I Pusat dan Bank Penyalur Gaji • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Bukti approval • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP Penunjukkan BO I Pusat dan Bank Penyalur Gaji • Laporan Gratifikasi

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	
11.	Penunjukan Persepsi	Bank Gratifikasi berupa uang/ barang	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Approval berjenjang • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP Penunjukkan Bank Persepsi • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Bukti approval • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP Penunjukkan Bank Persepsi • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Dit PKN
12.	Pembukaan Reksus pada Bank Syariah dari K/L	Gratifikasi berupa uang/ barang	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP Pembukaan Reksus pada Bank Syariah • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP Pembukaan Reksus pada Bank Syariah • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Dit PKN
13.	Persetujuan pembukaan rekening lainnya milik K/L	Gratifikasi berupa uang/ barang	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP Persetujuan pembukaan rekening lainnya milik K/L 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP Persetujuan pembukaan rekening lainnya milik K/L 	KPPN

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Gratifikasi Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	
14.	Perjanjian Kerjasama	Gratifikasi berupa uang/barang	<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi/GKM kode etik Pakta Integritas Pengawasan pimpinan/atasan langsung Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP Perjanjian Kerjasama Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik Dokumen Pakta Integritas Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP Perjanjian Kerjasama Laporan Gratifikasi Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Sekretariat / Direktorat
15.	Rekonsiliasi Rekening Pemerintah	Gratifikasi berupa uang/barang	<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi/GKM kode etik Pakta Integritas Pengawasan pimpinan/atasan langsung Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP Rekonsiliasi Rekening Pemerintah Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik Dokumen Pakta Integritas Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP Rekonsiliasi Rekening Pemerintah Laporan Gratifikasi Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Dit PKN
16.	Penyelesaian tagihan melalui penerbitan SP2D Migas	Gratifikasi berupa uang/barang	<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi/GKM kode etik Pakta Integritas Pengawasan pimpinan/atasan langsung Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP Penyelesaian tagihan melalui penerbitan SP2D Migas 	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik Dokumen Pakta Integritas Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP Penyelesaian tagihan melalui penerbitan SP2D Migas 	Dit PKN

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Gratifikasi Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	
17.	Penerbitan surat Dispensasi/Penyusunan Regulasi atau Penyusunan Kebijakan untuk K/L	Gratifikasi berupa uang/barang	<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi/GKM kode etik <ul style="list-style-type: none"> Pakta Integritas Pengawasan pimpinan/atasan langsung Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP Penerbitan surat Dispensasi Perpanjangan Pengesahan/ Penyusunan Regulasi atau Penyusunan Kebijakan Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik Dokumen Pakta Integritas Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP Penerbitan surat Dispensasi Perpanjangan Pengesahan/ Penyusunan Regulasi atau Penyusunan Kebijakan Laporan Gratifikasi Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Dit. APK
18.	Penerbitan SPM dalam rangka penyaluran dana belanja pensiun/Jaminan/pembayaran beras Bulog/pengembalian PFK/pengembalian penerimaan negara	Gratifikasi berupa uang/barang	<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi/GKM kode etik <ul style="list-style-type: none"> Pakta Integritas Pengawasan pimpinan/atasan langsung Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP Penerbitan SPM dalam rangka penyaluran dana belanja pensiun/Jaminan/pembayaran beras Bulog/ pengembalian PFK/pengembalian penerimaan Negara Menyampaikan surat kepada pemangku kepentingan untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik Dokumen Pakta Integritas Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP Penerbitan SPM dalam rangka penyaluran dana belanja pensiun/Jaminan/pembayaran beras Bulog/ pengembalian PFK/pengembalian penerimaan Negara Surat kepada pemangku kepentingan Laporan Gratifikasi Notulensi internalisasi/GKM terkait 	Dit. SP

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Rekonsiliasi data SPM dan realisasi pembayarannya	Gratifikasi berupa uang/ barang	& Sipandu) <ul style="list-style-type: none"> Internalisasi/GKM kode etik Pakta Integritas Pengawasan pimpinan/atasan langsung Menyampaikan surat kepada pemangku kepentingan untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	saluran pengaduan <ul style="list-style-type: none"> Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik Dokumen Pakta Integritas Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung Surat kepada pemangku kepentingan Laporan Gratifikasi Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Dit. PKN / Dit. SP / Kanwil / KPPN
20	Kegiatan kerja sama kelembagaan, baik dengan institusi dalam negeri maupun institusi dari negara lain	<ul style="list-style-type: none"> Gratifikasi barang Pemberian Honor/fee Jamuan makan bersama 	<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi/GKM kode etik Pengawasan pimpinan/atasan langsung Pakta Integritas Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG, dan melaporkan Gratifikasi terkait kedinasan berupa honorarium dan atau pembiayaan transportasi/akomodasi kepada atasan langsung 	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung Dokumen pakta integritas Laporan Gratifikasi 	DIT. SP
21	Host to host Perbankan dan Problem solving aplikasi dengan satker	Gratifikasi berupa uang/ barang	<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi/GKM kode etik Pakta Integritas Pegawai yang bertugas dan Pejabat kantor yang didatangi (khusus perbankan) Pengawasan pimpinan/atasan langsung Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG, dan melaporkan Gratifikasi terkait kedinasan berupa 	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik Dokumen Pakta Integritas Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung Laporan Gratifikasi 	Dit. SITP

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>honorarium dan atau pembiayaan transportasi/akomodasi kepada atasan langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	
22	Pemberian persetujuan pinjaman kepada debitur	Gratifikasi berupa uang/barang	<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi/GKM kode etik Pakta Integritas Pengawasan pimpinan/atasan langsung dan pengawasan peer Internalisasi Peraturan/SOP tekait pemberian persetujuan pinjaman kepada debitur Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik Dokumen Pakta Integritas Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung Notulensi Internalisasi Peraturan/SOP tekait pemberian persetujuan pinjaman kepada debitur Laporan Gratifikasi <ul style="list-style-type: none"> Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Dit. SMI
23.	Pemrosesan Penerbitan dan Perubahan Naskah Perjanjian Investasi Pemerintah, Penerusan Pinjaman dan Pinjaman di Bidang Investasi Pemerintah kepada BUMN, BUMD, Pemda dan Kredit Program	<ul style="list-style-type: none"> Gratifikasi berupa uang/barang Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan pimpinan/atasan langsung dan Pengawasan peer Pakta Integritas Internalisasi Peraturan/SOP tekait Penerbitan dan Perubahan Naskah Perjanjian Investasi Pemerintah, Penerusan Pinjaman dan Pinjaman di Bidang Investasi Pemerintah kepada BUMN, BUMD, Pemda dan Kredit Program Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung dan Pengawasan peer Dokumen Pakta Integritas Notulensi Internalisasi Peraturan/SOP tekait pemberian persetujuan pinjaman kepada debitur <ul style="list-style-type: none"> Laporan Gratifikasi Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Dit. SMI
24.	Penyusunan Dokumen Anggaran (DIPA) Awal dan Revisi DIPA	Gratifikasi berupa uang/barang	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan pimpinan/atasan langsung dan Pengawasan peer 	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung dan Pengawasan peer 	Dit. SMI

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemberian Pinjaman		<ul style="list-style-type: none"> • Pakta Integritas • Internalisasi Peraturan/SOP tekait Penyusunan Dokumen Anggaran (DIPA) Awal dan Revisi DIPA Pemberian Pinjaman • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pakta integritas • Notulensi Internalisasi Peraturan/SOP tekait Penyusunan Dokumen Anggaran (DIPA) Awal dan Revisi DIPA Pemberian Pinjaman • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	
25.	Penyelesaian piutang negara pada BUMN/Pemda/BUMD yang bersumber dari SLA/RDI/RPD	<ul style="list-style-type: none"> • Gratifikasi berupa uang/barang • Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pimpinan/atasan langsung dan Pengawasan peer • Pakta Integritas • Internalisasi Peraturan/ SOP tekait Penyelesaian piutang negara pada BUMN/Pemda/BUMD yang bersumber dari SLA/RDI/RPD • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung dan Pengawasan peer • Dokumen pakta integritas • Notulensi Internalisasi Peraturan/ SOP tekait Penyelesaian piutang negara pada BUMN/Pemda/BUMD yang bersumber dari SLA/RDI/RPD • Laporan Gratifikasi • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	Dit. SMI
26.	Penetapan remunerasi dan tarif Satker BLU	<ul style="list-style-type: none"> • Gratifikasi berupa uang/barang • Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Penetapan remunerasi dan tarif Satker BLU dilakukan oleh tim penilai • Sosialisasi Peraturan Remunerasi dan tarif BLU (PMK No 100/PMK.05/2016 dan No 176/PMK.05/2017) • Melaksanakan mekanisme pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Surat Keputusan Dirjen Perbendaharaan tentang Tim Penilai usulan tarif dan remunerasi instansi pemerintah yang menerapkan PK BLU. • Berita Acara rapat penilaian usulan tarif dan remunerasi BLU • Notulensi Sosialisasi PMK Nomor 100/PMK.05/2016 dan Nomor 176/PMK.05/2017 • Laporan Gratifikasi 	Dit. PPKBLU

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu)	• Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan		
27.	Penetapan BLU baru	• Gratifikasi berupa uang/barang • Fasilitas	• Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Penetapan Satker BLU baru dilakukan oleh tim penilai • Sosialisasi Peraturan Penetapan dan Pencabutan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PMK Nomor 180/PMK.05/2016) • Pembentukan Tim Lintas Eselon I • Penyusunan Kertas Kerja Penilaian BLU • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu)	• Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Surat Keputusan Dirjen Perbendaharaan tentang Tim Penilai usulan instansi pemerintah yang menerapkan PK BLU. • Berita Acara rapat penilaian usulan BLU baru • Notulensi Sosialisasi Peraturan Penetapan dan Pencabutan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PMK No 180/PMK.05/2016) • SK Tim Lintas Eselon I • Kertas Kerja Penilaian BLU • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan	Dit. PPKBLU	
28.	Pengesahan Anggaran	Revisi	• Gratifikasi berupa uang/barang • Fasilitas	• Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait Pengesahan Revisi Anggaran • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu)	• Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP terkait Pengesahan Revisi Anggaran • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan	Dit. PA/Kanwil

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Pemberian Dispensasi TUP di FO dan MO	<ul style="list-style-type: none"> • Gratifikasi berupa uang/ barang • Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Kampanye anti gratifikasi melalui baner, video, pamphlet dsb • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait pemberian dispensasi TUP di FO dan MO • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Baner, video, pamphlet anti gratifikasi • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP terkait pemberian dispensasi TUP di FO dan MO • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Kanwil
30.	Konsultasi Perbendaharaan dengan Pejabat	<ul style="list-style-type: none"> • Gratifikasi berupa uang/ barang • Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • CCTV • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait Layanan Konsultasi Perbendaharaan • Kampanye anti gratifikasi melalui baner, video, pamphlet dsb • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Rekaman • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP terkait Layanan Konsultasi Perbendaharaan • Kampanye anti gratifikasi melalui baner, video, pamphlet dsb • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Direktorat/ Kanwil / KPPN
31.	Pembinaan dan Supervisi KPPN	<ul style="list-style-type: none"> • Gratifikasi berupa uang/ barang • Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas pejabat/ pegawai yang melakukan pembinaan dan supervisi KPPN • Pengawasan pimpinan/atasan langsung 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas 	Kanwil

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait Pembinaan dan Supervisi KPPN • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP terkait Pembinaan dan Supervisi KPPN • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	
32.	Pelayanan FO/CSO	<ul style="list-style-type: none"> • Gratifikasi berupa uang/ barang • Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Kampanye anti gratifikasi melalui baner, video, pamflet dsb. • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Menerbitkan Surat pelarangan gratifikasi berupa uang/ barang/fasilitas lainnya • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait Pelayanan FO dan CSO • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Baner, video, pamflet anti gratifikasi • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Surat pelarangan gratifikasi berupa uang/ barang/fasilitas lainnya • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP terkait Pelayanan FO dan CSO • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Kanwil/KPPN
33.	Penerbitan Persetujuan TUP	<ul style="list-style-type: none"> • Gratifikasi berupa uang/ barang • Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Kampanye anti gratifikasi melalui baner, video, pamflet dsb. • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Menerbitkan Surat pelarangan gratifikasi berupa uang/ barang/fasilitas lainnya • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Baner, video, pamflet anti gratifikasi • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Surat pelarangan gratifikasi berupa uang/ barang/fasilitas lainnya 	KPPN

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>terkait Penerbitan Persetujuan TUP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP terkait Penerbitan Persetujuan TUP • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	
34.	Penerbitan SP2D	<ul style="list-style-type: none"> • Gratifikasi berupa uang/ barang • Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Kampanye anti gratifikasi melalui baner, video, pamphlet dsb. • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Pemantauan Pengendalian Utama SP2D-LS Non Gaji <i>Embedded Modul</i> • Menerbitkan Surat pelarangan gratifikasi berupa uang/ barang/fasilitas lainnya • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait Penerbitan SP2D • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Baner, video, pamphlet anti gratifikasi • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) secara periodik. • Surat pelarangan gratifikasi berupa uang/ barang/fasilitas lainnya • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP terkait Penerbitan SP2D • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	KPPN
35.	Ijin Pembukaan rekening satker	<ul style="list-style-type: none"> • Gratifikasi berupa uang/ barang • Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Kampanye anti gratifikasi melalui baner, video, pamphlet dsb. • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Menerbitkan Surat pelarangan gratifikasi berupa uang/ barang/fasilitas lainnya • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Baner, video, pamphlet anti gratifikasi • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Surat pelarangan gratifikasi berupa uang/ barang/fasilitas lainnya • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM 	KPPN

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>terkait Ijin Pembukaan rekening</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<p>SOP terkait Ijin pembukaan rekening</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	
36.	Penyelesaian garansi bank	<ul style="list-style-type: none"> • Gratifikasi berupa uang/barang • Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Kampanye anti gratifikasi melalui baner, video, pamflet dsb. • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait penyelesaian garansi bank • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Baner, video, pamflet anti gratifikasi • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP terkait Penyelesaian garansi bank • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	KPPN
37.	Penerbitan SKPP	<ul style="list-style-type: none"> • Gratifikasi berupa uang/barang • Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Kampanye anti gratifikasi melalui baner, video, pamflet dsb. • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait penerbitan SKPP • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Baner, video, pamflet anti gratifikasi • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP terkait penerbitan SKPP • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	KPPN
38.	Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN)	<ul style="list-style-type: none"> • Gratifikasi berupa uang/barang • Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Kampanye anti gratifikasi melalui baner, video, pamflet dsb. • Pengawasan pimpinan/atasan langsung 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Baner, video, pamflet anti gratifikasi • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung 	KPPN Khusus Penerimaan

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait Penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian pendapatan • Pemantauan Pengendalian Utama oleh UKI • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<p>langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP terkait Penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian pendapatan • Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama secara periodic • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	
39.	Koreksi data penerimaan negara segmen COA KPPN 999	<ul style="list-style-type: none"> • Gratifikasi berupa uang/barang • Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Kampanye anti gratifikasi melalui baner, video, pamflet dsb. • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait Koreksi data penerimaan negara segmen COA KPPN 999 • Pemantauan Pengendalian Utama oleh UKI • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Baner, video, pamflet anti Gratifikasi • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP terkait Koreksi data penerimaan negara segmen COA KPPN 999 • Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama secara periodic • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	KPPN Khusus Penerimaan
40.	Pengenaan Denda atas kurang/terlambat pelimpahan	<ul style="list-style-type: none"> • Gratifikasi berupa uang/barang • Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Kampanye anti gratifikasi melalui baner, video, pamflet dsb. • Pengawasan pimpinan/atasan langsung 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Baner, video, pamflet anti gratifikasi • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung 	KPPN Khusus Penerimaan

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP terkait pengenaan denda atas kurang/terlambat pelimpahan oleh bank persepsi Pemantauan Pengendalian Utama oleh UKI Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP terkait pengenaan denda atas kurang/terlambat pelimpahan oleh bank persepsi Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama secara periodic Laporan Gratifikasi Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 		
41.	Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Kompensasi atas permintaan pengembalian kesalahan/kelebihan pelimpahan pada Bank/Pos Persepsi	Surat Persetujuan Pelaksanaan Kompensasi atas permintaan pengembalian kesalahan/kelebihan pelimpahan pada Bank/Pos Persepsi	<ul style="list-style-type: none"> Gratifikasi berupa uang/barang Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi/GKM kode etik Pakta Integritas Kampanye anti gratifikasi melalui baner, video, pamflet dsb. Pengawasan pimpinan/atasan langsung Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP kegiatan terkait Pemantauan Pengendalian Utama oleh UKI Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik Dokumen Pakta Integritas Banter, video, pamflet anti gratifikasi Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP kegiatan terkait Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama secara periodic Laporan Gratifikasi Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	KPPN Khusus Penerimaan
42.	Penerbitan Keterangan Dibukukan (SKTB)	Surat Telah Dibukukan (SKTB)	<ul style="list-style-type: none"> Gratifikasi berupa uang/barang Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi/GKM kode etik Pakta Integritas Kampanye anti gratifikasi melalui baner, video, pamflet dsb. Pengawasan pimpinan/atasan langsung Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP penerbitan SKTB 	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik Dokumen Pakta Integritas Banter, video, pamflet anti gratifikasi Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP penerbitan SKTB 	KPPN Khusus Penerimaan

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Pengendalian Utama oleh UKI • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama secara periodic • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	
43.	Penerbitan Surat Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Gratifikasi berupa uang/barang • Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Kampanye anti gratifikasi melalui baner, video, pamphlet dsb. • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Internalisasi/GKM Peraturan dan SOP penerbitan surat konfirmasi setoran penerimaan negara • Pemantauan Pengendalian Utama oleh UKI • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Baner, video, pamphlet anti gratifikasi • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP penerbitan setoran penerimaan negara • Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama secara periodic • Laporan Gratifikasi • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	KPPN Khusus Penerimaan
44.	Pengajuan dari Debitur kepada KPPN KI (tagihan penerusan pinjaman maupun subsidi bunga)	Gratifikasi barang	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Kampanye anti gratifikasi melalui baner, video, pamphlet dsb. • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG • Sosialisasi/Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Baner, video, pamphlet anti gratifikasi • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Laporan Gratifikasi • Notulensi Sosialisasi/internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	KPPN Khusus Investasi

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45.	Rekonsiliasi semesteran <i>outstanding</i> pinjaman dari seluruh debitur	<ul style="list-style-type: none"> • Gratifikasi barang • Fasilitas • Pembayaran ganda terkait biaya transportasi dan akomodasi • Pemberian fasilitas yang tidak berhubungan dengan kegiatan pembinaan/ fasilitas hiburan 	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Kampanye anti gratifikasi melalui baner, video, pamflet dsb. • Pengawasan pimpinan/atasan langsung • Melaksanakan mekanisme pelaporan Gratifikasi melalui UPG, dan melaporkan Gratifikasi terkait kedinasan berupa honorarium dan atau pembiayaan transportasi/akomodasi kepada atasan langsung • Sosialisasi/Internalisasi pengaduan (WISE & Sipandu) <p style="text-align: right;">Saluran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Baner, video, pamflet anti gratifikasi • Notulensi arahan pimpinan/atasan langsung • Laporan Gratifikasi/Laporan Gratifikasi terkait kedinasan • Notulensi Sosialisasi/internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	KPPN Khusus Investasi

